



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



## **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA PONTIANAK**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pontianak telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Kesabngpol) Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Atas dasar ini RENJA-KESBANGPOL Tahun 2023 disusun dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berikut, dengan pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RENSTRA-KESBANGPOL Tahun 2020-2024 dan RPJMD Kota Pontianak 2020-2024.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini. Perlu disadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu masukan serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunannya di masa mendatang. Terima kasih.

Pontianak, Januari 2022

## DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak .....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. ....	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK.....	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak .....	24
3.3. Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak .....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BNAGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK .....	37
BAB V PENUTUP .....	39

## DAFTAR TABEL

Uraian	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Pontianak.....	8
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2020-2024.....	13
Tabel 2.3. Target Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020 2024.....	13
Tabel 2.4. Review Terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022.....	18
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023 .....	26
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2023 .....	28
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023.....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-KESBANGPOL) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan, penyusunan rancangan penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Kesbangpol) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2020-2024, karena Renja Perangkat Daerah menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tersebut ke dalam rencana

program/kegiatan dan penganggaran tahunan. Kedua dokumen perencanaan strategis jangka menengah tersebut adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan dokumen perencanaan strategis teknis dimaksud mengacu atau berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan RENJA-KESBANGPOL Tahun 2023 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak ini berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak 2020 -2024, dalam mendukung pencapaian Visi, yaitu : **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan bermartabat”** serta Misi ke-5 sesuai dengan urusan dan kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, yaitu : **“Mewujudkan Kota Yang Bersih, Hijau, aman, Tertib dan Berkelanjutan”**. Dengan demikian, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-KESBANGPOL) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang disusun ini diharapkan dapat mewujudkan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak Tahun 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 19 Tahun 2018 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023);
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020-2024;



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-KESBANGPO) Tahun 2023 adalah memberikan arah kebijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2020 –2024.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-KESBANGPO) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2023 adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023;
5. Tersedianya acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan publik;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA- PD) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2023 disajikan dalam 5 (lima) Bab dan masing-masing Bab memuat beberapa Sub Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KESBANGPOL TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Lalu (2021), dan perkiraan capaian tahun (triwulan I 2021) serta Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pontianak
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

## **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Dalam rangka mendukung tercapainya indikator sasaran maka dilakukan perhitungan detail dari anggaran yang tercantum dalam RKPD dengan memperhatikan analisa kebutuhan.

Wabah dan pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal Tahun 2020 hingga saat ini tidak terkecuali di Kota Pontianak sangat mempengaruhi ekonomi dan kehidupan masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Pontianak melakukan refocusing anggaran untuk membantu menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Refocusing beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana akhirnya dilakukan pengurangan dan pergeseran anggaran dalam APBD untuk menunjang operasional perangkat daerah. Total anggaran yang dikelola oleh Badan Kesbangpol Kota Pontianak tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28.790.390.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 22 kegiatan.

Anggaran sebesar Rp. 28.790.390.000,- tersebut dipergunakan untuk membiayai program rutin (program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota) sebesar Rp. 27.937.390.000,- sedangkan untuk program prioritas sebesar Rp.23.114.590.000,-

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan satu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang pencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBANGPOL) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak 2020-2024 adalah sebagaimana Tabel 2.1.berikut :

**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK**  
**KOTA PONTIANAK TAHUN 2021**  
**PENCAPAIAN RENSTRA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra KESBANGPOL ) Taun 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra KESBANGPOL s/d Tahun berjalan					
					Target Renja KESBANGPOL Tahun 2021	Realisasi Renja KESBANGPOL Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
8	01	02			<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan</b>	Persentase Jumlah Penanganan Konflik Sosial yang dapat ditangani	100 %	85 %	269,010,230	237,546,985	85	232.455.050	200324700	86,16
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	85 %	269,010,230	237,546,985	85	232.455.050	200324700	86,16
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Peserta Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	100 %	85 %	269,010,230	237,546,985	85	232.455.050	200324700	86,16

					Kebangsaan	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan															
8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persetase Jumlah Pemahaman Tentang Pendidikan Politik	100 %	85 %	3,394,778,953	3,394,778,953	85	3.367.210.512	3.367.210.512	99,92							
8	01	03	20.1		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Monitoring Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah	100 %	85 %	3,394,778,953	3,394,778,953	85	3.367.210.512	3.367.210.512	99,92							
8	01	03	20.1	05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Jumlah Peserta Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	100 %	85 %	3,394,778,953	3,394,778,953	85	3.367.210.512	3.367.210.512	99,92							

						Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah													
8	01	04	20.1		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persetanse Jumlah Ormas	100 %	85 %	8.250.000	8.250.000	85	-	-	-	-	-	-	-	-
8	01	04	20.1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pendataan Ormas	100 %	85 %	8.250.000	8.250.000	85	-	-	-	-	-	-	-	-
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Persentase Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dilingkungan Pemerintah Kota serta Pembentukan Kader P4GN	100 %	85 %	159,358,207	159,358,207	85	-	-	-	-	-	-	-	-
8	01	05	20.1		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya	100 %	85 %	159,358,207	159,358,207	85	-	-	-	-	-	-	-	-

8	01	05	20.1	04	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Dialog FKUB, Pembentukan Satgas/Relawan Anti Narkoba					85	-	-	-
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan	100 %	80 %	875,850,000	818,200,000	80 %	962450000	962450000	99,17
8	01	06	20.1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	100 %	80 %	875,850,000	818,200,000	80 %	962450000	962450000	99,17
8	01	06	20.1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi (Forkopimda dan FKDM)	100 %	100 %	968530000	968530000	100%	795.950.000	789.825.000	99,23
8	01	06	20.1	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Rapat (Kominda)	100 %	100 %	659,250,000	659,250,000	100	166.500.000	166.500.000	98,86



				Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut di atas, bahwa Rekapitulasi Evaluasi hasil terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBAGPOL) Tahun 2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-KESBANGPOL) Periode 2020-2024 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, dapat dijelaskan dengan pokok-pokok materi yang dapat disajikan sebagai berikut :

**1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021).**

Pada RENJA-KESBANGPOL Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merencanakan 6 program dan melaksanakan 22 kegiatan serta Kegiatan Non-Teknis administrasi pekantoran.

Dari 6 Program dan 22 Kegiatan tersebut, akibat adanya pandemi covid 19 yang mewabah di Indonesia khususnya Kota melakukan refofusing dana untuk mendukung dan menunjang penanggulangan wabah covid 19. Refocusing dana ini berimbas pada seluruh kegiatan pada Badan Kesbangpol Pontianak, mengakibatkan seluruh Perangkat Daerah setelah pelaksanaannya bahwa Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pada :

Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan :

- Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )
- Fasilitasi Forum Pembauran kebangsaan ( FPK )
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.

Sedangkan pada Program Pembinaan dan Politik kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, diantaranya :

- Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama ( Dialog Kerukunan )
- Fasilitasi Forum Koodinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
- Pembinaan / Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan
- Sosialisasi Bahaya Narkoba dan P4GN kepada ASN
- Pelatihan dan Pemetaan Kapasitas Satgas dan Relawan Anti Narkoba

## 2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Penyediaan anggaran kegiatan yang cukup agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya sehingga konsistensi terhadap target Renstra Perangkat Daerah dapat tercapai.
- Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran) sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesbangpol Kota Pontianak

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak 2020-2024 yang disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2020-2024.

Berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak 2020-2024, bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Visinya, yaitu "**Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan bermartabat**" serta Misi ke- 5 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, yaitu "**Mewujudkan Kota Yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan**" sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.2 berikut.

Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut diatas, maka Analisis Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2020-2024 tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 2.2. berikut.

**Tabel 2.2**  
**Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak**

No	Indikator	Target Renstra PD					Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	98	100	21.74	0
2.	Partisipasi Politik.	75	75	75	80	85	70	72	75	0	0
3.	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintah daerah	96,8	97,01	98	98,50	99	88,60	92,62	96,82	51.12	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kantor Kesbangpol Kota Pontianak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Pada Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan umum yang terdiri dari :

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia;
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di Kota Pontianak merupakan urusan wajib dan menjadi urusan pemerintahan umum, dan inilah salah satu yang menjadi isi strategis terkait tupoksi Kantor Kesbangpol baik sebagai instansi vertikal maupun SKPD.

#### **a. Analisis Tingkat Kinerja**

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak dari tahun 2022 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yaitu :

- Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
- Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak dalam perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya implementasi regulasi sistem perencanaan.
- Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
- Belum terpenuhinya formasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontinak sesuai dengan struktur perangkat daerah.
- Belum Optimalnya penerapan Teknologi Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- Minimnya alokasi dana yang diperuntukkan untuk program dan kegiatan pada Kantor Kesbangpol dan alokasi dana diperuntukkan untuk pos- pos tim.

#### **b. Isu-Isu strategis Perangkat Daerah**

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan juga situasi keamanan dan ketertiban setiap saat terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Pontianak dapat di kemukakan beberapa Isu-Isu strategis terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, politik kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
2. Peningkatan penyediaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak guna keperluan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak
4. Mengoptimalkan pengimplementasian regulasi sistem perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.
6. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
7. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang profesional.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBANGPOL) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBANGPOL) Tahun 2023 yang disusun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBANGPOL) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak. Program dan kegiatan Tahun 2023 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2023 yang merupakan penyelarasan program

secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBANGPOL) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen Renja-KESBANGPOL yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Pontianak Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3. berikut.



**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>1</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	<b>Persentase Peningkatan Wawasan dalam Kehidupan Kebangsaan dan Bernegara</b>	80 %	248,468,500	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	<b>Persentase Peningkatan Wawasan dalam Kehidupan Kebangsaan dan Bernegara</b>	80%	248,468,500	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Kegiatan	248,468,500	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Kegiatan	248,468,500	
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Jumlah Peserta Kegiatan Perumusan Kebijakan	360 Peserta	248,468,500	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Jumlah Peserta Kegiatan Perumusan Kebijakan	60 Peserta	248,468,500	

	Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	, semua Kelurahan	Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	, semua Kelurahan	Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persetase Jumlah Pemahaman Tentang Pendidikan Politik	80 %	3,776,476,800	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persetase Jumlah Pemahaman Tentang Pendidikan Politik	80 %	3,360,823,000	
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah,	5 Kegiatan	3,776,476,800	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah,	2 Kegiatan	3,360,823,000	

	kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah			pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah	225 Peserta	3,776,476,800	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah	60 Peserta 12 Parpol	3,360,823,000	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Persetanse Jumlah Ormas	80 %		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Persetanse Jumlah Ormas	80 %		

	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	, semua Kelurahan				<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	, semua Kelurahan				
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pendataan Ormas	1 Dokumen		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pendataan Ormas	1 Dokumen		
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persentase Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dilingkungan Pemerintah Kota serta Pembentukan Kader P4GN	80 %		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persentase Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dilingkungan Pemerintah Kota serta Pembentukan Kader P4GN	80 %		
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	3 Kegiatan		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	1 Kegiatan		

			Ekonomi sosial dan Budaya					Ekonomi sosial dan Budaya			
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Sosialisasi dan Dialog FKUB, Pembentukan Satgas/Relawan Anti Narkoba	3 Kegiatan		Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Sosialisasi dan Dialog FKUB, Pembentukan Satgas/Relawan Anti Narkoba	1 Kegiatan		
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan	100 %		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan	100 %		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	2 Kegiatan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	2 Kegiatan		
	Pelaksanaan Koordinasi di	Kota	Jumlah Rapat Koordinasi	12 Kali		Pelaksanaan Koordinasi di	Kota	Jumlah Rapat Koordinasi	12 Kali		

	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	(Forkopimda dan FKDM)			Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	(Forkopimda dan FKDM)			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Rapat (Kominda)	12 Kali		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Rapat (Kominda)	12 Kali		

	konflik di Daerah					konflik di Daerah					

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan Forum OPD. Usulan program dan kegiatan dapat di jelaskan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Wawasan dalam Kehidupan Kebangsaan dan Bernegara	80 %	Diperlukannya penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut dan juga akan dimaksimalkan pelaksanaannya melalui Zoom Meeting/daring
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Kegiatan	
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Peserta Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	360 Peserta	
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Persentase Jumlah Pemahaman Tentang Pendidikan Politik	80 %	Meskipun tidak terlaksanakan kami melakukan pembinaan partai politik sedangkan yang lain nya akan di usulan di tahun 2022
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	5 Kegiatan	



	pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah		
	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah	255 peserta	Dari kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu; sosialisasi politik pemula dan perempuan kami berupaya akan tetap melaksanakan dalam bentuk lain yaitu sosialisasi
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Persentase Jumlah Ormas	80 %	Perlunya dibangun sistem/aplikasi untuk memudahkan pendataan dan fasilitasi pembinaan ormas/Lsm
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pendataan Ormas	1 Kegiatan	
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta Pembentukan Kader P4GN	80 %	Pada Program ini dapat berkesinambungan dan akan diprioritaskan di tahun 2022
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya	3 Kegiatan	
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Sosialisasi dan Dialog FKUB, Pembentukan Satgas/Relawan Anti Narkoba	3 Kegiatan	
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS</b>	Kota Pontianak, Semua	Persentase Jumlah Konflik Yang dapat di tangani	100 %	

	<b>DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kecamatan , semua Kelurahan			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	2 Kegiatan	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Rapat Koordinasi (Forkopimda dan FKDM)	12 Bulan	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Rapat (Kominda)	12 Bulan	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA PONTIANAK**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran III tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”. Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedulatan rakyat.

Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut yaitu :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (1 indikator);
2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri (4 indikator);
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 indikator);
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional (2 indikator);
5. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (2 Indikator).

Penetapan program dan kegiatan prioritas tersebut di atas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Disamping itu terdapat juga Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga Stabilitas Politik dan Ketahanan Bangsa, yaitu :

- a. Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan Demokrasi melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Politik, Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik, dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; dan
- b. Penguatan Integritas Nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara dan Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pontianak masa bhakti 2020-2024 telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun Visinya adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”.

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya;
2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi Serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas;
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing;
5. Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan.

Berdasarkan misi diatas, Kantor Kesbangpol Kota Pontianak mengemban misi ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan. Menilik dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pontianak maka Badan Kesbangpol Kota Pontianak memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Pontianak yang Kondusif, Demokratif dan Partisipatif”, dengan misi

“Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Untuk Mendukung Stabilitas Politik Daerah yang Kondusif”.

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menetapkan 1 (satu) Tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, yaitu : Meningkatnya Toleransi Di Kalangan Masyarakat.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 -2024, sebagai berikut :

1. Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak
2. Meningkatkan rencana dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sampai dengan tahun 2020 -2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut Tabel 3.1 mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2023.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator RENSTRA Perangkat Daerah**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020-2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran (impact)	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Meningkatkan Toleransi dikalangan Masyarakat	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih	70%	72 %	75%	75%	75%	80%	85%	85%
			Persentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak Terjadi Konflik	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020- 2024 yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Perencanaan program dalam dokumen Rencana Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diterapkan prinsip perencanaan *money follow program* dengan mengaju Penyelarasan Program berdasarkan Peraturan Permendagri No 90 Tahun 2019. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2023.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi.

Dalam Rencana Kerja (RENJA-PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2023 ini memuat 5 (lima) Program dan 5 kegiatan Berdasarkan penyelarasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KESBANGPOL Kota Pontianak.

Seluruh program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2023 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra-PD yang terkait dengan rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2023 Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.



**Tabel 3.2**

**Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak  
 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat / Pemerintahan Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>													
8	1				<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						28,790,390,000						75,178,090,000	
8	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						3,958,800,000						3,833,500,000	
8	1	1	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						10,000,000						21,000,000	
8	0	0	2.01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase tingkat kepuasan bidang atau bagian terhadap pelayanan kesekretarian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		90 %	8 Dokumen	12 Bulan	5,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang atau bagian terhadap pelayanan kesekretarian	90 %	15,000,000
8	0	0	2.01	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tingkat kepuasan bidang atau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jangka waktu pemenuhan perencanaan		90 %	7 Dokumen	12 Bulan	5,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang atau bagian	90 %	6,000,000

					bagian terhadap pelayanan kesekretarian	Daerah	an dan evaluasi kinerja perangkat daerah								terhadap pelayanan kesekretarian			
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>3,475,800,000</b>						<b>2,850,000,000</b>
8	0	0	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretarian	Jumlah orang yang menerima Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu peyelenggaraan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah		90 %	22 Orang/Bu	1a1n2 Bulan	3,175,800,000	PENDAPATA ASLI DAERA (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	N H r	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretarian	90 %	2,500,000,000
8	0	0	2.02	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretarian	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka Waktu peyelenggaraan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah		90 %	6 Dokumen	12 Bulan	300,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretarian	90 %	350,000,000
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>35,000,000</b>						<b>60,000,000</b>
8	0	0	2.05	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretarian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN dan Non ASN		90 %	32 Unit	28 Orang	35,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretarian	90 %	60,000,000
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>217,000,000</b>						<b>287,500,000</b>

8	0	0	2.06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu penyelenggaraan Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah		90 %	1 Paket	12 Bulan	2,500,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	7,000,000
8	0	0	2.06	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu penyelenggaraan Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah		90 %	1 Paket	12 Bulan	30,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	40,000,000
8	0	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu penyelenggaraan Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah		90 %	1 Paket	12 Bulan	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	60,000,000
<b>Kode</b>					<b>Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>			<b>Rencana Tahun 2023</b>					<b>Catatan Penting</b>	<b>Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024</b>			
						<b>Capaian Program</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Lokasi Output Kegiatan</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>			<b>Pagu Indikatif (Rp.)</b>		<b>Sumber Dana</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>		<b>Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)</b>
										<b>Progra m</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>				<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggand	Jangka Waktu penyelenggaraan Administrasi Umum		90 %	1 Paket	12 Bulan	30,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan	90 %	55,000,000

						pelayanan kesekretariatan	aan yang Disediakan	Organisasi Perangkat Daerah						kesekretariatan			
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jangka Waktu penyelenggaraan Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	90 %	12 Dokumen	12 Bulan	4,500,000	Pendapatan Bagi Hasil	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	5,500,000	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka Waktu penyelenggaraan Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	90 %	7 Laporan	12 Bulan	100,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	120,000,000	
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>30,000,000</b>					<b>150,000,000</b>
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %	2 Unit	12 Bulan	30,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	150,000,000	

<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>170,000,000</b>					<b>445,000,000</b>	
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 %	2 Laporan	12 Bulan	35,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	45,000,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 %	4 Laporan	12 Bulan	135,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	400,000,000
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>21,000,000</b>					<b>20,000,000</b>	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah		90 %	2 Unit	2 Unit	6,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	10,000,000

8	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah daerah		90 %	1 Unit	2 Unit	15,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	10,000,000
8	1	2			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>								319,000,000			600,000,000		
8	1	2	2,0	1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>								319,000,000			600,000,000		
Kode	Kode				Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan dlam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan		100 %	700 Orang	3 Kegiatan	319,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan dlam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	100 %	600,000,000

							n											
8	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>										23,114,590,000			65,314,590,000
8	0	0	2.0		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>										23,114,590,000			65,314,590,000
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Kegiatan		80 %	36 Orang	3 Kegiatan	3,314,590,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik	80 %	3,314,590,000

							Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik di Daerah											
8	0 1	0 3	2.0 1	0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan	Jumlah Kegiatan		80 %	10 Orang	3 Kegiat an	19,400,000,00 0	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik	80 %	60,000,00 0,000



							Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik di Daerah											
8	0 1	0 3	2.0 1	0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe	Jumlah Kegiatan		80 %	1 Laporan	3 Kegiatan	400,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik	80 %	2,000,000,000



							Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Jumlah organisasi Masyarakat di Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Bantuan dan Jumlah Laporan		80 %	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Jumlah organisasi Masyarakat di Kota Pontianak	80 %	30,000,000	
8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>							<b>250,000,000</b>						<b>1,200,000,000</b>	
8	1	5	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>							<b>250,000,000</b>							<b>1,200,000,000</b>

8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta Pembentukan Kader P4GN	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan		80 %	500 Orang	3 Kegiatan	250,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta Pembentukan Kader P4GN	80 %	1,200,000,000
8	1	6			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>							<b>728,000,000</b>					<b>3,500,000,000</b>	
8	1	6	2,0	1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>							<b>728,000,000</b>					<b>3,500,000,000</b>	
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Jumlah kegiatan / Jumlah Rapat		100 %	220 Orang	12 Laporan	547,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani	100 %	3,000,000,000

						antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
8	0	0	2.0	0			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	1	6	1	5		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Jumlah kegiatan / Jumlah Rapat		100 %	12 Laporan	12 Laporan	181,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani	100 %	500,000,000



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusun RENJA-PD berpedoman pada RENSTRA Kantor KESBANGPOL Kota Pontianak dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA-PD merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA-PD yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2020 -2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023**  
**Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Toleransi Di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	1. Persentase Penanganan Potensi Konflik Agar tidak terjadi Konflik.	Jumlah Masyarakat yang dibina tahun dan dikurangi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dibagi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dikalikan 100%.	Persen	100
			2. Persentase Pemahaman Pendidikan Politik			
			3. Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM di Kota Pontianak	Jumlah potensi Konflik Sosial yang diselesaikan tahun n dibagi Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n dikalikan 100%.	Persen	75



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada prinsipnya bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penyusunan RENJA-PD juga berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas, sedangkan yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RENJA-PD juga dilakukan dengan tahapan dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang berlaku yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, Visi dan Misi Walikota Pontianak, RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan, DPA SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Rencana tindak lanjut dari rumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023 ini juga adalah sebagai bahan penyusunan dan penetapan Rencana Operasional pada rencana Tahun Anggaran 2023.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.



Pit. KEPALA KESBANGPOL  
KOTA PONTIANAK

RIZAL.S.SOS